

## Daftar Bacaan

### **Buku:**

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, 1982, Jakarta.

Simanjuntak Ricardo, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat pengkajian hukum, 2005, Jakarta.

Dipo Wahyono, Materi Bahan Ajar Hukum Dagang, FH Untag Surabaya, 2015

Fajar Sugianto, Materi Bahan Ajar Hukum Kepailitan, FH Untag Surabaya, 08 Maret 2015

Muljadi Kartini, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta,

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Hadjon Philipus M, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September-Desember, 1997.

Admosuridjo Prajudi, hokum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet 9, Jakarta 1998.

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Hadjon Philipus M, Makalah Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun.

Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6, 2014.

Budiardjo Miriam, Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi, Rajawali press, Jakarta, 2010.

Atmadjaya Djoko Imbawani, Hukum Dagang Indonesia, Setara Press, Malang, 2004

Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Stroink F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Steinberg, Adolescence'6<sup>th</sup> ED, USA :The Grow Hill Higher, 2002, dalam Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung, Depdiknas.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika serikat (Common Law System), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

Mahadi, Falsafah Hukum; suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2003

Anna Erliyana, Keputusan Presiden: Analisis Keppres RI 1987-1998, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2004).

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

P.N. H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Djambatan.

Fuady Munir, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Sinaga Syamsudin M, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah di amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2005.

Garner Briyan, Black's Law Dictionary, Thomson Reuters, United States of America, 2004.

**Website:**

<http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2017, Pukul 16:01 WIB.

<http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2017, Pukul 18:45 WIB.